EQuator

Jumat, 11 Februari 2011

Bansos KONI

Baru Satu Tersangka

Kasus menghebohkan ini pernah ditangani Poltabes tapi kandas. KPK sempat ambil alih dan menyerahkan ke Polda. Mulai ada progress. Siapa lagi calon tersangka lainnya?

PONTIANAK. Meski terkesan lamban, pengusutan kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi mulai menunjukkan kemajuan. Polda Kalbar menetapkan seorang tersangka, Iswanto, mantan Wakil Bendaharawan KONI Kalbar, Kamis (10/2) kemarin.

"Hari ini (kemarin, red) kita menetapkan Iswanto sebagai tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akal bertambah karena masih banyak saksi yang akan dimintai keterangan," kata AKBP Drs Suhadi SW MSi, Kabid Humas Polda Kalbar, kemarin.

Ketika ditetapkan sebagai tersangka, Iswanto sedang menjalani pemeriksaan lanjutan atas kasus dugaan korupsi yang dilakukannya. Polisi memiliki cukup bukti untuk menetapkan Iswanto sebagai tersangka, berdasarkan keterangan tersangka dan sejumlah saksi yang telah memberikan keterangan.

Selama pengusutan kasus ini, polisi telah memeriksa sebanyak 19 saksi terdiri atas berbagai unsur yakni delapan orang dari PNS di lingkungan Pemprov Kalbar, delapan pengurus KONI Kalbar serta tiga pengurus cabang olahraga.

Menurut Suhadi, dalam penanganan Bansos tersebut, pihaknya berupaya mengungkap keterlibatan semua pihak yang terlibat. Karena itu, banyak diperlukan keterangan saksi. Penyidik masih membutuhkan banyak keterangan saksi, terutama dari pengurus cabang olahraga.

Untuk itu, semua pengurus cabang olahraga bakal dipanggil untuk dimintai keterangan. "Masih banyak saksi yang akan kita panggil, terutama dari pengurus cabang olahraga. Ada sekitar 30 pengurus cabang olahraga dalam waktu dekat akan kita minta kesaksiannya,"

■ Halaman 7

Bansos KONI

..... dari halaman 1

ungkap Suhadi lagi.

Kasus Bansos Provinsi sebelumnya pernah ditangani Polresta Pontianak tetapi tanpa hasil. Kemudian diambil alih Polda. Namun sebelum Polda, KPK sempat mengambilalih. Namun kasus itu kembali dilimpahkan oleh KPK kepada Polda Kalbar.

Sekadar mengingatkan, mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regular yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2009, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2009.

Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI.

Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya ada pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI Kalbar kepada Satgas Pelatda PON XVII sebesar Rp 8,59 miliar. Yang terakhir ada ketekoran kas KONI Kalbar tahun 2009 yang terindikasi kerugian daerah sebesar Rp 2,114 miliar.

Terkait kemungkinan adanya penambahan tersangka, Rizal Karyansyah, pengacara mantan Sekda Kalbar, Syakirman selaku pengguna anggaran yang sudah pernah diperiksa penyidik kepolisian yakin kliennya tidak bersalah. "Dalam pencairan dana itu, klien saya sudah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur," kata Rizal.

Sementara terkait status Syakirman sebagai bendahara KONI, Rizal juga yakin Syakirman tidak melakukan penyelewengan. "Dia itu kan hanya bertugas memberikan dana kepada Pengcab-Pengcab. Soal penggunaan di Pengcab, kalau ada penyelewengan berarti kesalahannya ada pada Pengcab," bela Rizal.

Tak hanya Syakirman, Rizal juga menjadi pengacara untuk empat saksi lain yang sudah diperiksa polisi, yakni Syarifah Tauhidah, Redi Sumardi, Walidad, dan Gustamir.

"Saya yakin mereka berempat ini juga tidak berasalah. Karena sebagai PNS, mereka melakukan tugas sesuai dengan prosedur yang ada," tuntasnya. ***(arm/bdu)***